



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *Alhamdulillah* kami panjatkan kehadiran Allah Subhahuwata'ala atas rahmat dan hidayah yang dbierikan oleh-Nya sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas yang tersusun dalam berbagai tujuan, sasaran kebijakan, serta program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan perencanaan kinerja seluruh kegiatan yang dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026. Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini merupakan tanggung jawab dari masing-masing Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana Kerja yang dipaparkan merupakan rencana Perangkat Daerah pada satu tahun ke depan dengan memperhatikan berbagai macam kebutuhan masyarakat, Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya serta program kerja strategis dan prioritas dari pemerintah daerah yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Rancangan Akhir Rencana Kerja ini menjadi gambaran atas apa yang akan dilakukan oleh prangkat daerah terkait dengan tugas dan fungsinya, baik dalam hal program kegiatan maupun kinerja anggaran. Disamping itu juga terdapat beberapa analisis terkait dengan kondisi yang telah berlangsung sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja kedepan.

Disamping itu Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 juga dimaksudkan dalam rangka mempertajam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Saran, masukan bahkan kritik yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dikemudian hari.

Dengan adanya dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak melenceng dari perencanaan yang sudah ditetapkan sehingga menghasilkan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Semoga Allah SWT, selalu meridhoi usaha dan kerja keras kita semua.

Tarempa, 22 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Latar Belakang	1
1.3 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..	21
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	37
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	38
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	13
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	19
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kepulauan Anambas	26
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	36
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Renstra Tahun 2021 – 2026	39
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	43
Matriks	Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah untuk periode satu tahun. Hal tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lebih lanjut mengenai dasar dari tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. RENJA sendiri merupakan penjabaran dari RENSTRA perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 hakikatnya dapat mempermudah setiap PD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahunan

pada RENSTRA perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi di masing-masing perangkat daerah. Dinamika ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal termasuk isu-isu aktual perangkat daerah. Berbagai perkembangan maupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*).

Di dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang telah dirumuskan di dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus kajian meliputi analisis kondisi kekinian perangkat daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah. Selain itu, untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, RENJA Perangkat Daerah juga memuat berbagai persoalan yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Usulan masyarakat tersebut terjaring pada saat berlangsungnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal dengan istilah MUSRENBANG, yang pelaksanaannya di mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

Di dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RENJA Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setia Perangkat Daerah, yang disusun sesuai berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan pagu indikatif merupakan anggaran yang tersedia untuk mendanai berbagai program/kegiatan yang penghitungannya didasarkan pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa RENJA Perangkat

Daerah merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis sebagai bentuk perencanaan lima tahunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 yang merupakan wujud nyata dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berupa dokumen perencanaan tahunan. Perangkat Daerah ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta bertanggungjawab penuh terhadap pencapaian tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Perangkat Daerah sebagai manifestasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025. Selain itu, RENJA pada Perangkat Daerah ini harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah Tahun 2025 serta bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kepulauan Riau, dan harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan di dalam penyusunan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 – 2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RENJA ini adalah sebagai penyempurnaan dari Rancangan Awal RENJA guna memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 adalah:

- a. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam RENSTRA sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara khusus RENJA ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Menjadikan RENJA sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
- d. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan dan dibagi ke dalam empat BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi RENJA, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023

Pada BAB ini diuraikan mengenai evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, reviu terhadap rancangan awal RENJA Perangkat Daerah, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bagian ketiga dalam dokumen RENJA ini akan dikemukakan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB penutup menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian selama pelaksanaan kegiatan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing program dan kegiatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membandingkan target kinerja dengan capaian kinerja yang diraih.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;

- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, jumlah anggaran yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun anggaran 2023, dalam APBD Murni tahun 2023 adalah sebesar **Rp.15.275.092.278,00**. Jumlah anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 2 Program, 11 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Selama proses berjalan, muncul kegoncangan dalam ketersediaan anggaran dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap segala kebutuhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Penyesuaian tersebut juga dilakukan dalam rangka mengakomodir beberapa kegiatan mendesak yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan Pergeseran Anggaran.

Setelah dilakukakan pergeseran terakhir, jumlah anggaran dari Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar **Rp.14.410.822.696,00**. Pengurangan anggaran tersebut juga disejalankan dengan pengurangan dari beberapa sub kegiatan sehingga menjadi 23 sub kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut, Realisasi fisik dari program, kegiatan serta sub kegiatan adalah sebesar **100%** dengan realisasi keuangan mencapai **98,06%** atau sebesar **Rp.14.130.718.437,00** dari total anggaran yang dikelola selama tahun 2023.

Dalam kaitannya dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, juga telah dilakukan penyesuaian, dimana jumlah anngaran yang dialokasikan dalam RENSTRA sampai dengan tahun 2026 adalah sebesar **Rp.136.277.678.298,00**. Sampai dengan tahun 2023, jumlah anggaran yang

dialokasikan sebagaimana yang terdapat dalam DPA Perubahan atau Pergeseran adalah sebesar **Rp.47.934.441.393,00** atau **35,17%**. Dari jumlah anggaran tersebut, yang sudah terealisasi sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar **Rp.43.490.413.727,00** dengan tingkat capaian realisasi target Renstra sebesar **31,91%** dari total anggaran Renstra.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun lalu dan Capaian Renstra Satpol PP dalam hal anggaran dapat dilihat pada Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) / 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1) / 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		136.277.678.298	46.611.013.954	14.410.822.696	14.130.718.437	98,06	12.426.833.361	72.371.143.879	53,11
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.175.189.801	42.507.773.954	13.012.229.470	12.936.798.404	99,42	12.093.919.761	67.538.492.119	67,42
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	729.672.000	124.692.220	20.156.000	12.204.000	60,55	43.280.300	180.176.520	24,69
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	35.956.215.611	15.292.054.566	4.666.993.659	4.644.803.256	99,52	5.072.707.604	25.009.565.426	69,56
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	414.000.000	108.000.000	36.000.000	36.000.000	100,00	33.564.000	177.564.000	42,89

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) / 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1) / 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	3.115.050.650	1.555.723.300	842.594.280	841.990.500	99,93	0	2.397.713.800	76,97
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	5.138.337.681	1.677.283.931	533.765.337	528.803.119	99,07	445.948.451	2.652.035.501	51,61
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	13.562.643.709	1.825.488.070	608.706.622	608.706.570	100,00	366.183.300	2.800.377.940	20,65
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.918.082.500	21.622.198.017	6.228.542.072	6.188.897.659	99,36	6.061.158.576	33.872.254.252	84,85
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.341.187.650	302.333.850	75.471.500	75.393.300	99,90	71.077.530	448.804.680	33,46
1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Terselesaikan	31.710.049.857	2.467.637.743	1.398.593.226	1.193.920.033	85,37	332.913.600	3.994.471.376	12,60
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada								

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) / 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1) / 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	20.357.530.057	1.645.483.893	1.295.673.226	1.113.500.033	85,94	134.095.600	2.893.079.526	14,21
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	8.997.695.800	526.060.650	12.920.000	12.920.000	100,00	69.876.000	608.856.650	6,77
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	2.354.824.000	296.093.200	90.000.000	67.500.000	75,00	128.942.000	492.535.200	20,92
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Respons Time Kejadian Kebakaran	4.392.438.640	1.635.602.257	0	0	0,00	0	838.180.384	19,08
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	2.681.585.000	838.180.384	0	0	0,00	0	838.180.384	31,26
1.05.04.2.02	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang diinspeksi	75.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) / 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) / (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun (n-1) / 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1.05.04.2.03	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	30.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
1.05.04.2.04	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat yang Diberdayakan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1.605.853.640	797.421.873	0	0	0,00	0	0	0,00

Mengacu kepada hasil evaluasi Renja sebagaimana terdapat pada Tabel T-C.29 diatas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Tingkat Capaian Realisasi Program/Kegiatan;

Sesuai Rencana Kerja (RENJA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023, kinerja perangkat daerah sesuai dengan indikator kinerja dan anggaran, untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran mencapai **99,42%** dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum **85,37%**. Akumulasi tingkat capaian realisasi anggaran dari kedua program tersebut cukup memuaskan yaitu sebesar **98,06%**.

Kedua program tersebut mengakomodir 11 (sebelas) kegiatan, yaitu 8 kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 3 kegiatan pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tingkat realisasi keuangan

Dari 11 kegiatan tersebut, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya kurang memuaskan (< **85,00%**), yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi keuangan **60,55%** dan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota pada Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi keuangan **75,00%**. 9 (sembilan) kegiatan lain tingkat realisasi sudah diatas **85,00%**, bahkan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasinya mencapai **100%**.

b. Faktor Terkait Tingkat Capaian Realisasi Program/Kegiatan;

Keterbatasan dalam ketersediaan anggaran merupakan faktor utama yang mengakibatkan beberapa belanja kegiatan sebagaimana tersebut diatas tidak bisa direalisasikan. Disamping itu, proses pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (**UKPBJ**) Kabupaten Kepulauan Anambas yang kurang profesional dalam menangani pengadaan barang/jasa perangkat daerah juga sangat berpengaruh terhadap realisasi keuangan perangkat daerah.

c. Implikasi Capaian Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;

Sesuai data yang disajikan dalam Tabel T-C.29 di atas, ditinjau dari segi keuangan, Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra sampai dengan tahun 2024 adalah **53,11%**. Capaian tersebut tergolong rendah. Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap terhadap capaian kinerja program Renstra perangkat daerah. Implikasi dari hal tersebut menimbulkan kurang efektifnya perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan dalam pelaksanaan

d. Kebijakan yang Diambil Dalam Rangka Perbaikan.

Langkah-langkah yang diambil dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam upaya pencapaian realisasi yang realistis sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

- Melakukan efisiensi dan kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan, dengan melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan agar berlangsung secara bersamaan dengan pemanfaatan sumber anggaran yang tersedia.
- Koordinasi dengan **UKPBJ** dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa guna penyesuaian jadwal pelaksanaan dan konsolidasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perlu disampaikan disini bahwa sampai dengan bulan Oktober 2022, sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja masih menjadi perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran dan nomenklatur perangkat daerah masih bernama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kepulauan Anambas nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dan sesuai Surat Bupati Kepulauan Anambas nomor 481/Kdh.KKA.060/10.2022 tanggal 31 Oktober

2022, telah dilakukan pemisahan beberapa perangkat daerah termasuk Satpol PP, yang sesuai dengan surat tersebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan nomenklatur perangkat daerah berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, sementara Sub Urusan Pemadam Kebakaran sudah diampu langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Begitu juga dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, seiring dengan perubahan perangkat daerah, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja juga sudah dilakukan penyesuaian, sehingga Sub urusan kebakaran yang sebelumnya masih menjadi salah satu indikator kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, maka indikator kinerja tersebut juga sudah tidak lagi menjadi beban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak ditampilkan lagi dalam Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Satpol PP Tahun 2024.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbub, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang harus dipenuhi, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel T-C.30.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(10)	(11)	(12)	(12)	(13)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi			B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	B (69,00)	CC (54,27)	-	B (69,00)	B (69,00)	
2.	Nilai Predikat AKIP			B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (74,00)	B (67,30)	BB (69,76)	BB (74,00)	BB (74,00)	

3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan			86%	100%	90%	100%	86%	100%	90%	92%	
4.	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3			86%	100%	90%	100%	86%	100%	90%	92%	

Berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas, dapat kami sampaikan sebagai berikut;

a. Indeks Reformasi Birokrasi;

Untuk tahun 2023, terkait dengan Reformasi Birokrasi belum dilakukan pengukuran, sehingga tingkat capaian Indeks Reformasi Birokrasi belum bisa ditampilkan.

b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai predikat AKIP untuk tahun 2023 sedikit mengalami peningkatan. Target dari indikator nilai predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah predikat BB dengan nilai capaian 71,00. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, nilai capaian masih dibawah target yaitu 69,76 atau 98,25% dari target dan predikat capaian sudah BB.

Proses pengadministrasian dan pendokumentasian pelaksanaan kinerja merupakan faktor utama yang menjadi kendala, sehingga capaian Nilai Predikat AKIP masih di bawah target.

c. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan;

Sampai dengan tahun 2023, indikator tersebut masih belum terstruktur dalam pengukurannya. Maka metode yang digunakan dalam mengukur adalah dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu

tahun 2023. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyusunan formulasi sehingga hasil pengukurannya lebih akuntabel.

d. **Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3**

Sejalan dengan indikator pada point c, indikator tersebut masih belum terstruktur dalam pengukurannya. Maka metode yang digunakan dalam mengukur adalah dengan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2023. Untuk selanjutnya akan dilakukan penyusunan formulasi sehingga hasil pengukurannya lebih akuntabel.

Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa target sudah tercapai.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian, dan sangat berpengaruh dalam upaya pencapaian kinerja terkait tugas dan fungsi tersebut. Isu-isu tersebut harus dirumuskan secara cermat guna mengidentifikasi permasalahan dan solusi serta proses pelaksanaan dari Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun beberapa isu strategis yang teridentifikasi adalah :

a. **Pengembangan Kabupaten Layak Anak.**

Kabupaten Layak Anak merupakan salah satu isu yang diangkat oleh pemerintah daerah untuk tahun 2023, dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggaran sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemenuhan hak anak. Kondisi lingkungan dan masyarakat yang tertib dan tentram

serta perlindungan terhadap anak merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan perkembangan anak.

b. Kabupaten Kota Sehat.

Lingkungan yang sehat merupakan dambaan dari setiap manusia, dan merupakan salah satu faktor pendukung upaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat. Dalam kaitan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja juga berperan dalam upaya menciptakan keindahan lingkungan dalam masyarakat.

c. Stunting

Stunting yang menjadi salah satu isu nasional dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal juga menjadi perhatian dari perangkat daerah, khususnya dengan memberikan dukungan kepada perangkat daerah pengampu isu dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat akan arti penting Stunting guna membangun keluarga indonesia yang sehat dan tanggung.

d. Pengarusutamaan Gender.

Gender merupakan salah satu isu nasional yang sampai saat ini menjadi salah satu prioritas dan pembangunan nasional dalam meningkatkan peran dan fungsi sumber daya manusia dalam pembangunan.

e. Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan adanya inovasi yang kreatif dan efektif agar pelayanan tersebut dapat berlangsung secara maksimal, efektif dan efisien dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Disamping beberapa isu diatas, juga terdapat beberapa isu internal yang juga perlu mendapat perhatian adalah seperti:

- a. Pembinaan aparatur melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan, guna meningkatkan kinerja aparatur dalam upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Diperlukan adanya standarisasi kualifikasi aparatur sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara cepat, tepat dan mengena sesuai maksud dengan dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Pengawasan swakarsa yang ada dalam masyarakat, baik yang kemunculannya atas inisiasi perangkat daerah maupun atas inisiatif masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam mengemban tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Terhadap pengawasan swakarsa ini diperlukan adanya pengaturan baik terhadap kegiatan penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain sehingga tidak menimbulkan benturan yang justru dapat menyebabkan terganggunya upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
- c. Minimnya anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Polisi Pamong Praja sehingga berakibat pada program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat berjalan dengan optimal.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Akhir RKPD Satuan Polisi Pamong Praja merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, yang disusun dalam rangka mengemban upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Beberapa isu mendasar seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemulihan dan pembangunan ekonomi, upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pemenuhan utilitas dasar seperti listrik dan air bersih merupakan permasalahan yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tahun 2025.

Berdasarkan hasil review terhadap dokumen RENSTRA perangkat daerah, dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja dimana untuk tahun 2025 jumlah anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp.25.520.237.437,00** dengan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan.

Setelah dilakukan analisis, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang selama tahun 2023 dan kondisi awal tahun 2024 serta kondisi keuangan daerah yang belum stabil, berbagai kebijakan harus diambil dalam rangka penyesuaian tersebut. Penyesuaian juga dilakukan dalam rangka mengakomodir Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1371 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terdapat beberapa sub kegiatan yang terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang harus disesuaikan, khususnya terkait dengan kode dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025, terdapat penyesuaian yang harus dilakukan khususnya terhadap sub kegiatan. Penyesuai yang dilakukan adalah dengan cara :

- mengurangi jumlah anggaran sub kegiatan agar realistis dengan kebutuhan;
- penghapusan sub kegiatan dalam rangka efisiensi sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan;
- pemecahan/pengalihan sub kegiatan yang ada guna menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru.

Berdasarkan hasil review dan analisis yang dilakukan, untuk tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja akan menyelenggarakan 2 (dua) program 11 (sebelas) kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan.

Dari segi jumlah anggaran juga mengalami perubahan sehingga kebutuhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah menjadi sebesar **Rp.21.865.444.440,00**, terdapat efisiensi sebesar **14,32%** dari pagu semula yang terdapat pada dokumen RENSTRA perangkat daerah.

Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian anggaran berdasarkan hasil Review terhadap Rancangan Awal RKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C.31. berikut:

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Anambas

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	18.015.452.775	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	16.949.952.775	
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100 Persen	165.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100 Persen	135.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	65.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	65.000.000	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	-	0	
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	0	
7.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	60.000.000	
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100 Persen	6.671.626.517	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	100 Persen	6.661.126.517	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang / Bulan	6.460.206.517	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang / Bulan	6.460.206.517	
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	160.920.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70 Dokumen	160.920.000	
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	5.500.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0	
6.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	
7.	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	
c.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang terselesaikan	100 Persen	90.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang terselesaikan	100 Persen	90.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	5.000.000	
3.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	80.000.000	
d.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100 Persen	685.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	100 Persen	675.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Paket	250.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200 Paket	250.000.000	
2.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	
3.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	10.000.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	0	
4.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	400.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	400.000.000	
e.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	100 Persen	1.110.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	100 Persen	1.055.000.000	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	25.000.000	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	210.000.000	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	35.000.000	
4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	150.000.000	
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	55.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0	
7.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	
8.	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.000.000	
9.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	500.000.000	
10.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	
f.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	2.300.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	1.450.000.000	
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	350.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	350.000.000	
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	200.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	200.000.000	
4.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	450.000.000	
6.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	
7.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	
g.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.703.826.258	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	6.593.826.258	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.856.050	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.856.050	
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	110.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	0	
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.502.970.208	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.502.970.208	
h.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	290.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 Persen	290.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Persen	160.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	95 Persen	160.000.000	
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.000.000	
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	90.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	15 Unit	90.000.000	
II.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan terselesaikan	92 Persen	7.504.784.662				92 Persen	4.915.491.665	
			Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 Persen					100 Persen		
i.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	92 Persen	5.054.784.662	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	92 Persen	3.865.491.665	
1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	15 Dokumen	350.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	300.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	450.000.000	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	450.000.000	
3.	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	350 Orang	795.491.665	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Kep. Anambas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	350 Orang	795.491.665	
4.	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	200.000.000	Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokume Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	200.000.000	
5.	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	100.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	100.000.000	
6.	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	35 Kasus	700.000.000	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	35 Kasus	700.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 Kasus	350.000.000	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Kasus	120.000.000	
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	35 Laporan	350.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	35 Laporan	350.000.000	
9.	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	100 Unit	1.759.292.997	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	850.000.000	
j.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	92 Persen	1.950.000.000	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	92 Persen	550.000.000	
1.	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	40 Laporan	600.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	12 Laporan	180.000.000	
2.	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	3 Laporan	700.000.000	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Sesuai SOP	2	250.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	40 Laporan	650.000.000	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	12	120.000.000	
k.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase PPNS yang aktif	60 Persen	500.000.000	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Kep. Anambas	Persentase PPNS yang aktif	60 Persen	500.000.000	
1.	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan	0	Sub Kegiatan Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan	300.000.000	
2.	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	0	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 Laporan	200.000.000	
3.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penigkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	12 Laporan	500.000.000	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Kep. Anambas	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penigkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Perda	-	0	
	JUMLAH				25.520.237.437					21.865.444.440	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sampai dengan tahapan penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2025 merupakan tahun transisi pemerintahan setelah proses pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengawal kondisi tersebut agar tetap kondusif. Antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya konflik of interest yang berkepanjangan harus dilakukan agar ketertiban dan keamanan di masyarakat tetap terjaga.

Disamping itu, terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, tahun 2025 juga merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Oleh sebab itu skala prioritas baru juga harus dilaksanakan dengan mengacu kepada perencanaan tersebut dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta kebijakan yang ditetapkan di daerah.

Memperhatikan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, agenda pembangunan nasional tahun 2025-2029 adalah Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial, budaya dan ekologi.

Sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja harus bisa memberikan kontribusi dalam upaya pelaksanaan agenda pembangunan tersebut. Agenda pembangunan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung program pembangunan nasional adalah terkait dengan Supremasi Hukum,

Satabilitas dan Kepemimpinan Indonesia. Penguatan kelembagaan perangkat daerah dan peningkatan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia Satpol PP menjadi perhatian utama. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya supremasi hukum terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada, dalam ruang lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk menjaga kondusifitas ketentraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional dalam bentuk rumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi perangkat daerah. Hal ini harus dilakukan agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, dengan mengacu kepada indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Selanjutnya, tujuan yang akan diwujudkan tersebut dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Secara umum, sasaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas ini menggambarkan berbagai kebijakan yang dihasilkan, serta perubahan dan perbaikan kondisi di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan tetap mengacu kepada tema dan skala prioritas pembangunan daerah di tahun 2025.

Adapun Tema Pembangunan pada RKPD 2025 yaitu **“Optimalisasi pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan infrastruktur berkelanjutan”**. Dengan tema tersebut telah ditetapkan rancangan prioritas pembangunan untuk tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi unggulan daerah;
2. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing;
3. Pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas; dan
4. Optimalisasi reformasi birokrasi.

Dalam rangka mengimplementasikan maksud dan tujuan dari tema serta prioritas pembangunan tahun 2025, ketentraman, ketertiban, keamanan harus kondusif. Dan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memastikan hal tersebut.

Mengacu kepada tema dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025, tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 juga harus memperhatikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu **“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”** yang diterjemahkan kedalam 7 (tujuh) Misi, juga sudah direalisasikan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026. Tujuan dan Sasaran sesuai RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Sesuai RENSTRA Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)

		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%	95%

Sumber: Renstra 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan implementasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditentukan yang proses penyusunannya harus direncanakan melalui proses perumusan terhadap berbagai faktor penentu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi yang diharapkan berlaku sehingga proses pencapaiannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih menitikberatkan pada penegakan Peraturan Daerah dan Penanganan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan faktor berikut:

1. Tegaknya peraturan dan kebijakan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mengacu kepada peraturan dan keteentuan yang berlaku;

4. Kondisi strategis daerah dan nasional

Berbagai faktor tersebut dapat dicapai melalui beberapa program/kegiatan yang diusulkan. Rumusan program dan kegiatan dimaksud mempertimbangkan isu-isu penting dan aktual. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas harus dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Tahun 2025. Keberhasilan dalam pencapaian target program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah di sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan dan Kebijakan Daerah, berbanding lurus dengan tersedianya anggaran.

Mengacu kepada surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/30/BAPPEDA/SD/1/2024 tanggal 31 Januari 2024, tentang Permintaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, Alokasi Pagu Indikatif untuk Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp.12.226.833.361,00**. Sementara jika dibandingkan dengan hasil review dan analisis terhadap Rancangan Awal RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, jumlah kebutuhan anggaran perangkat daerah tahun 2025 adalah sebesar **Rp.21.865.444.440,00**. Tentunya jumlah tersebut masih jauh, karena hanya **55,92%** dari rencana kebutuhan.

Setelah dilakukannya Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 dalam rangka penajaman rancangan program, kegiatan dan sug kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dihasilkan kesepakatan bahwa tambahan pagu belanja sebesar **Rp.838.723.087,00**, atau **6,86%** dari pagu indikatif Rancangan Awal Renja. Jumlah penambahan tersebut telah disetujui untuk menjadi pagu indikatif Rancangan Akhir berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/135/BAPPEDA/SD/6/2024 tanggal 13 Juni 2024, tentang Penyesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun

2025 pada Aplikasi SIPD-RIS, sehingga pagu indikatif untuk Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.13.065.556.448,00**. Rincian belanja dari program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 hasil kesepakatan dari Forum Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Berita Acara Hasil Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Kepulauan Anambas.

Penambahan pagu tersebut dimaksudkan guna mengakomdir 3 (tiga) sub kegiatan baru yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan juga untuk optimalisasi belanja dari beberapa sub kegiatan yang ada. Dengan adanya penambahan pagu anggaran indikatif tahun 2025, maka jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diakomodir oleh Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 adalah sebanyak 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Sementara untuk Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026, sesuai hasil rasionalisasi dan penyesuaian terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dengan RENSTRA perangkat daerah, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2026 adalah sebesar **Rp. 21.655.978.801,00**. Rincian rencana program, kegiatan dan Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				13.065.556.448			21.655.978.801
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				13.065.556.448			21.655.978.801
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen	12.578.897.448		100 Persen	16.855.978.801
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	30.000.000	DAU	100 Persen	165.000.000
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	5.302.348.104	DAU	100 Persen	7.032.152.543
1.05.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terselesaikan	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	33.564.000	DAU	100 Persen	80.000.000
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	239.220.000	DAU	100 Persen	400.000.000
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	461.535.938	DAU	100 Persen	960.000.000
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	416.183.300	DAU	100 Persen	1.400.000.000
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	100 Persen	6.061.158.576	DAU	100 Persen	6.593.826.258
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kep. Anambas	95 Persen	34.887.530	DAU	95 Persen	265.000.000

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan terselesaikan		92 Persen	486.659.000		92 Persen	4.800.000.000
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		100 Persen			100 Persen	
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti	Kab. Kep. Anambas	92 Persen	230.295.000	DAU	92 Persen	2.300.000.000
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditangani	Kab. Kep. Anambas	92 Persen	93.630.000	DAU	92 Persen	2.000.000.000
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS yang aktif	Kab. Kep. Anambas	60 Persen	162.734.000	DAU	60 Persen	500.000.000
JUMLAH					13.065.833.361			21.655.978.801

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang direncanakan Satuan Polisi Pamong Praja telah dirumuskan melalui berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja lebih menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, upaya Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu kepada surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/30/BAPPEDA/SD/1/2024 tanggal 31 Januari 2024, tentang Permintaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025, Alokasi Pagu Indikatif untuk Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar **Rp.12.226.833.361,00**. Setelah dilakukan penajaman melalui Forum Perangkat Daerah disepakati penambahan pagu anggaran belanja sebesar **Rp.838.723.087,00**, atau **6,86%** dari pagu indikatif Rancangan Awal Renja Satpol PP Tahun 2025. Sehingga pagu indikatif untuk Rancangan Rencana Kerja Satpol PP Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.13.065.556.448,00**.

Dan berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/135/BAPPEDA/SD/6/2024 tanggal 13 Juni 2024, tentang Penyesuaian Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Aplikasi SIPD-RI, telah dilakukan rasionalisasi terhadap pagu indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan pada RENJA perangkat daerah, ditetapkan bahwa pagu anggaran untuk Rancangan Akhir RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.13.065.556.448,00**.

Jika mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 jumlah pagu anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar **Rp.25.520.237.437,00**. Jadi terdapat selisih antara pagu RENSTRA dengan asumsi pagu untuk Rancangan Renja Tahun 2025 sebesar **Rp.12.454.680.989,00**. Kondisi ini sudah barang tentu berdampak terhadap pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025.

Dengan nilai pagu akhir RENJA yang hanya **51,20%** dari rencana kebutuhan sesuai RENSTRA, maka untuk Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 hanya dapat mengakomodir 2 program, 11 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Berikut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut, sebagaimana tercantum pada Matriks Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2025 berikut.

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						13.065.556.448,00								21.655.978.801,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.065.556.448,00								21.655.978.801,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.065.556.448,00								21.655.978.801,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 Persen	12.578.897.448,00						-	16.855.978.801,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	-			100 Persen	30.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang terselesaikan</i>	-			100 Persen	5.302.348.104,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	7.032.152.543,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				28 Orang/bulan	5.174.068.104,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		6.871.232.543,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				70 Dokumen	128.280.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		160.920.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi BMD yang Terealisasi</i>	-			100 Persen	33.564.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	33.564.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terealisasi</i>	-			100 Persen	239.220.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				26 Orang	239.220.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan</i>	-			100 Persen	461.535.938,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	960.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	5.246.737,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	90.847.784,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				15 Paket	9.596.177,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	83.872.240,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	13.529.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	258.444.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Dokumen Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	-			100 Persen	416.183.300,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	1.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	366.183.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	6.061.158.576,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	6.593.826.258,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	43.350.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		90.856.050,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.017.808.576,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		6.502.970.208,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara</i>	-			95 Persen	34.887.530,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	265.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	26.967.530,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				15 Unit	7.920.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan</i>	-			100 Persen 92 Persen	486.659.000,00						-	4.800.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti</i>	-			92 Persen	230.295.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat	-	2.300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan</i>				16 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat		650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				35 laporan	140.295.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditegakkan</i>	-			92 Persen	93.630.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat	-	2.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				10 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				40 Laporan	43.630.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP dan Masyarakat		1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<i>Persentase PPNS yang aktif</i>	-			60 Persen	162.734.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP	-	500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			<i>Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah</i>				1 Laporan	79.584.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS</i>				12 Laporan	83.150.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan yang Optimal Pemantapa n kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	OPD Satpol PP		200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
J U M L A H								13.065.556.448,00							21.655.978.801,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani bagi Perangkat Daerah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah di Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut juga dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, dilanjutkan dengan menguraikan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas juga mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu strategis terkait pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja, baik di level nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diperlukan adanya sinkronisasi berbagai kebijakan pada tingkat nasional yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian yang membidangi sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Perda/Perkada. Masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah juga menjadi multak adanya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RENJA ini.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi RENJA merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengampu Urusan Wajib Pelayanan Dasar sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun alokasi anggaran yang tercantum dalam Renja ini masih bersifat indikatif. Dengan demikian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 selain mengacu pada RENJA ini juga menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi RENJA ini. Semoga Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2025 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RENJA ini.

Ditetapkan di : Tarempa
Tanggal : 22 Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681127 200003 1 005